

ANALISIS PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT PERUSAHAAN BUMN TERHADAP AUDIT REPORT LAG

Puti Dwi Handayani (20121112032)

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate whether characteristics of corporate governance (Board and Audit Committee) associated with audit report lag (ARL) in BUMN companies listed on the stock exchanges in Indonesia during 2012-2014. Purposive sampling is chosen as the sampling method of this study. Data obtained from secondary data in the annual reports of 19 companies listed on the Stock Exchange in 2012-2014. Hypotheses in this empirical study are based on the prior research and supporting theories that are then analyzed using Eviews 7.1 program.

The result prove that variable board size, independent board, audit committee competence has significant negative effect with ARL in BUMN companies. But, Audit committee size and audit committee meeting has not significant negative effect with ARL in BUMN companies. Board size, independent board, audit committee size, audit committee competence, and audit committee meetings are more shorten audit report lag.

Keywords: *Audit Report Lag, Characteristics of Corporate Governance, Board, Audit Committee.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, dunia perekonomian banyak mengalami perkembangan sehingga mendorong perekonomian nasional dan internasional menuju perdagangan bebas yang semakin memperketat persaingan antar perusahaan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka pihak manajemen berusaha mendapatkan lebih banyak dana. Cara lain untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan dengan menjual kepemilikan saham perusahaan kepada para investor (Iskandar & Trisnawati, 2010). Sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar modal salah satunya adalah laporan keuangan yang wajib di sampaikan perusahaan yang *Go Public*. Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu (Rachmawati 2008).

Informasi agar dapat dipercaya disajikan secara akurat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan audit. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak terhadap penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas auditnya (Iskandar & Trisnawati, 2010).

Berdasarkan peraturan Bapepam No. X.K.2, lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai saat ini belum mempengaruhi peraturan yang berlaku

sebelumnya, sehingga peraturan yang digunakan masih menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Pada peraturan tersebut yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Sesuai dengan peraturan tersebut Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Interval waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan sampai tanggal yang tertera di laporan audit disebut dengan *audit report lag* atau dalam beberapa penelitian dinyatakan sebagai audit delay (Afify 2009). Lamanya waktu penyelesaian proses audit (*audit report lag*) akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Iskandar & Isnawati, 2010). Hingga tahun 2014 ini sering terjadi kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah di audit dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana manajer (agen) memiliki informasi lebih banyak dari pemegang saham (*principal*) dan dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan manajer itu sendiri (Godfrey, 2010).

Masalah antara agen dan *principal* ini dapat dikurangi dengan pelaksanaan *corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Dauod *et al*, 2014). Tata kelola perusahaan yang efektif dianggap dapat mengurangi masalah *audit report lag*, sehingga adanya mekanisme tata kelola perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja audit dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit (Dauod *et al*, 2014). Meskipun *corporate governance* penting, sangat sedikit bimbingan profesionalnya dalam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kekuatan *corporate governance* ketika mengembangkan strategi audit (Afify, 2009). Namun, untuk auditor melihat dari persepektif klien ialah mereka yang menjadikan komite audit dan pendekatan pengawasan tersebut dapat mengurangi risiko bisnis klien secara keseluruhan dan pada saatnya nanti dapat berpotensi mempengaruhi penilaian risiko audit berikutnya (Afify, 2009). Misalnya, fungsi pengawasan yang kuat akan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa pengendalian sudah beroperasi secara efektif dan mengurangi risiko pengendalian yang dinilai (AICPA, 1988,1995, 1997 dalam Afify, 2009). Selanjutnya, dalam kasus di mana struktur perusahaan klien telah efektif dan menerapkan pemantauan yang kuat serta perspektif strategis yang kuat, itu dapat berpotensi untuk lebih efisien dalam audit (Cohen *et al.*, 2002 dalam Afify, 2009), dan karenanya itu *corporate governance* berhubungan dengan *audit report lag*.

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Bursa Efek Indonesia). Keberadaan Komisaris Independen dan Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No.Kep-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) wajib memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit. Peraturan ini secara efektif diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan publik yang mencatatkan diri di BEJ.

Karakteristik *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris dan keberadaan komite audit sesuai dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No.Kep-315/BEJ/06/2000.

Penelitian ini memasukkan variabel kontrol ukuran perusahaan. Pentingnya variabel kontrol tersebut dimasukkan ke dalam model penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris sejauh mana variabel kontrol tersebut ikut mempengaruhi antara karakteristik *corporate governance* terhadap *audit report lag*. Ukuran perusahaan dapat mencerminkan faktor internal perusahaan dan ukuran penting untuk menunjukkan perusahaan tergolong sehat baik secara financial (Rachmawati 2008).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Naimi et al (2010) adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel independen CEO *Duality* dikarenakan adanya perbedaan sistem yang digunakan oleh Malaysia dan Indonesia. Sistem yang digunakan Malaysia *one tier system* pengurus perusahaan dan dewan sebagai pengawas perusahaan hanya terdapat satu dewan yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif dalam sistem ini tidak ada perbedaan fungsi direktur (OECD, 2015). Sedangkan Indonesia menggunakan *two tier system* dimana Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dalam perusahaan dan Dewan direksi yang melakukan pengurusan perusahaan yang artinya adanya perbedaan fungsi dalam sistem ini (OECD, 2015). Perbedaan selanjutnya dari variabel kontrol yang digunakan penelitian ini yaitu *performance* diproksikan dengan ukuran perusahaan. Karena menurut peneliti ukuran perusahaan dapat menggambarkan kinerja perusahaan semakin perusahaan itu besar artinya perusahaan tersebut sudah berhasil dalam melaksanakan kinerjanya dan juga sebagai ukuran penting untuk menunjukkan perusahaan tergolong sehat. Jenis industri juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menggunakan semua perusahaan yang ada di Malaysia tetapi penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN di Indonesia. Alasannya karena perusahaan ini yang dimiliki Negara dalam melaksanakan *good corporate governance* banyak mengalami ketidakefisienan dan masih lemah. *Corporate governance* dalam perusahaan BUMN hanya berlaku dua periode jabatan sehingga memungkinkan ketidakefisienan, peneliti ingin membuktikan apakah itu dapat menyebabkan lamanya penyampaian laporan keuangan yang dikarenakan *audit report lag*.

Sehubungan dengan hal yang memberikan gagasan dan motivasi bagi penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit pada Perusahaan BUMN terhadap Audit Report Lag**

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Dalam penelitian ini digunakan Teori Agensi (*agency theory*) sebagai *grand theory*. Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance* (Pickett, 2005: 11). Teori agensi adalah hubungan kerjasama 2 pihak, dimana agen melakukan kegiatan prinsipalnya/ pihak yang berkepentingan. Dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi tindakan *agent* (misal: manajer) dan *principal* (misal pemegang saham) (Godfrey, 2010: 362). Suatu hubungan keagenan muncul ketika ada kontrak dimana satu pihak (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Godfrey, 2010).

Teori agensi membangun teori berdasarkan pada adanya informasi asimetris (*assimetric information*) antara keunggulan informasi pihak manajemen (*agent*) dengan

pihak pemilik (*principal*). Terjadinya asimetris informasi disebabkan karena pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan, sedangkan pihak pemilik tidak mempunyai informasi mengenai prospek suatu perusahaan (Godfrey, 2010: 363). Adanya asimetri informasi menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik yang disebut dengan *agency problem*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat dua macam *agency problem*, yaitu :

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agent benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Jadi, teori agensi ini yang mendasari hubungan auditor dengan *principal*, auditor masuk sebagai *intermediary* (penghubung) antara *agent* dengan *principal* karena adanya asimetris informasi yang terjadi antara *agent* dan *principal*, keduanya memiliki kepentingan berbeda sehingga di asumsikan bahwa *agent* cenderung tidak terbuka kepada *principal* asumsi ini kemudian menyarankan kepada *principal* agar tidak percaya begitu saja terhadap laporan keuangan yang disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban *agent*. Untuk memastikan laporan keuangan bisa dipercaya, maka *principal* meminta pihak eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dijadikan pertanggungjawaban *agent* kepada *principal*.

Perusahaan yang melaksanakan praktek *corporate governance*, diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan *audit report lag*. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agensi, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Prinsip-Prinsip OECD i.e *The Organization For Economic Cooperation and Development*, 2015).

2.2 Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2015) "laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan secara ringkas yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2015), "tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi". Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2015) yang disahkan pada tahun 2014 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 01 Januari 2015, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan; dan
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. Aset
- b. Liabilitas
- c. Ekuitas
- d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- f. Arus Kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. (PSAK No. 1 Revisi 2015)

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (PSAK No. 1 Revisi 2015).

2.3 Audit dan Standar Audit

Definisi audit sendiri seperti yang diungkapkan oleh Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014 : 24) dalam bukunya *Auditing and Assurance Service* yaitu :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”

Menurut Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014 : 32-35) Audit pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audit), adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor Independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit), adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang pembuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai di pemerintahan.
3. Audit Operasional (Operational Audit), merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, seorang auditor memiliki pedoman yang dinamakan standar auditing. Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Standar Umum, yaitu:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya yang cermat.

b. Standar Pekerjaan Lapangan, yaitu:

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten dalam pelaksanaan audit harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian saat dilakukan.
3. Bukti audit dikatakan kompeten jika diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan, yaitu:

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi.

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah mengungkapkan hasil penelitian tentang hubungan ukuran dewan komisaris dengan *audit report lag*. Hubungan ukuran dewan komisaris dengan *audit report lag* menurut Mouna & Anis (2013) mengungkapkan antara dewan komisaris dan dengan *audit report lag* mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak memiliki pengaruh yang cukup besar, sama halnya dengan Wu *et al* (2008) mengungkapkan bahwa jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif dengan *audit report lag* dengan pengaruh yang besar. Berbeda dengan Mouna & Anis (2013) dan Wu *et al* (2008), Naimi *et al* (2010) mengungkap bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif tetapi menunjukkan dewan komisaris tidak sepenting dengan komite audit terhadap *audit report lag*, serta Daoud *et al* (2014) juga mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang sedikit lebih cepat dalam pelaporannya daripada yang memiliki dewan komisaris yang banyak namun tidak menemukan bukti bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh besar terhadap *audit report lag*.

Tugas dewan komisaris sesuai peraturan yang diuraikan diatas adalah untuk memonitor dan mengontrol suatu perusahaan, yang dapat menjadi masalah utama dalam melaksanakan tugasnya adalah adanya masalah komunikasi dan koordinasi. Apabila setiap dewan komisaris memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam hal itu merupakan masalah yang menjadi suatu kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak dalam hal mengungkapkan laporan keuangan tepat waktu, di bandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit. Tetapi kelemahan itu apabila bisa ditutupi akan mungkin bisa menjadi koordinasi yang baik apabila memiliki jumlah dewan komisaris yang banyak. Seperti halnya yang dikatakan Wu *et al* (2008) apabila jumlah dewan komisaris banyak, tidak akan membuat pelaporan keuangan tidak tepat waktu karena dengan banyaknya dewan komisaris membuat tidak ada kelemahan dalam berkoordinasi untuk pelaporan keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan Naimi *et al* (2010) diharapkan jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H_1 = Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap *Audit Report Lag*

Dewan komisaris yang independen dengan keterampilannya yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan pemegang saham dipandang lebih baik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam direksi (Naimi *et al*, 2010). Hasil penelitian yang diungkapkan Afify (2009) bahwa hubungan antara dewan komisaris independen dengan *audit report lag* mempunyai hubungan yang signifikan dan memiliki pengaruh negatif. Sama halnya dengan Afify (2009), hasil penelitian Shukeri (2010) mengungkapkan dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *audit delay*, dan hasil penelitian Apadore & Noor (2013) mengungkapkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif dengan *audit report lag* tetapi pengaruh tersebut tidak besar. Berbeda dengan Afify (2009), Shukeri (2010), dan Apadore & Noor (2013), Wu *et al* (2008) menemukan bukti bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag* yang signifikan. Dan Daoud *et al* (2014) menyatakan hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh besar.

Dari uraian diatas adanya keberadaan Komisaris Independen ini, karena tidak terafiliasi dengan pendiri atau pemegang saham mayoritas, diharapkan bisa mewakili

kepentingan pemegang saham publik sehingga ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan kebenaran yang *valid*. Dengan begitu, kepentingan investor saham sebagai pemegang saham publik lebih terjamin. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti pengaruh komisaris independen terhadap panjang-pendeknya *audit report lag* di Perusahaan BUMN Indonesia.

H_2 = Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap *Audit Report Lag*

Kemudian, pengaruh komite audit yang pertama diproksikan dengan jumlah komite audit, Menurut Naimi *et al* (2010), bahwasemakin besar ukuran Komite Audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan. Hasil penelitian Naimi *et al* (2010) dan Apadore (2013) membuktikan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif secara signifikan. Serta Shukeri & Nelson (2010) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa jumlah komite audit mempunyai pengaruh negatif yang tidak besar atau tidak signifikan terhadap *audit report lag*.

Ukuran komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini yang menimbulkan persepsi bahwa semakin banyak anggota Komite Audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 = Ukuran Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*

Selain itu kompetensi dari komite audit dapat berpengaruh juga, seperti hasil penelitian yang dilakukan Naimi *et al* (2010) dan Shukeri & Nelson (2010) menyatakan bahwa kompetensi dari komite audit mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan artinya tidak mempengaruhi cukup besar. Karena apabila komite audit sesuai dengan kompetensinya dapat secara mudah untuk mengontrol dan mengawasi audit laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan bisa membantu agar pelaporan keuangan tepat waktu atau bisa mengurangi *audit report lag*. Dengan demikian muncul persepsi bahwa anggota komite audit memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Keuangan lebih mungkin untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material, sehingga dapat memperpendek *audit report lag*.

H_4 = Kompetensi Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*

Lalu pengaruh pertemuan komite audit dengan *audit report lag*, seperti hasil penelitian yang dilakukan Naimi *et al* (2010) menyatakan bahwa pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan, sama halnya dengan Naimi *et al* (2010) Shukeri & Nelson (2010) mengungkapkan bahwa pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak cukup besar.

Adanya pertemuan yang sering dilakukan oleh Komite Audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit. Jika komite Audit menemui masalah yang dihadapi dalam proses laporan keuangan, dan frekuensi pertemuan komite audit rendah maka, masalah tidak dapat diperbaiki atau diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, diharapkan adanya frekuensi pertemuan komite Audit yang tinggi dapat memperpendek *Audit Report Lag*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_5 = Pertemuan Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis selanjutnya mengenai pengaruh kelima variabel tersebut secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi *audit report lag*.

H_6 = Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Pertemuan Komite Audit Berpengaruh Simultan Terhadap *Audit Report Lag*.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan BUMN yang *go public* selama periode 2012-2014.. Objek yang digunakan adalah perusahaan BUMN di Indonesia dengan data penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2012-2014. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method* dan mendapatkan sampel sebanyak 17 perusahaan. Model pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan alat bantu *E-Views* versi 7.1.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag* suatu perusahaan. Variabel *audit report lag* dilambangkan dalam variabel ARL. *Audit report lag* adalah interval waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan sampai tanggal yang tertera di laporan audit (Afify, 2009). Selain itu dapat diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Variabel *audit report lag* diukur secara kuantitatif jumlah hari antar akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan.

$$ARL_{it} = \beta_0 + \beta_1 BSIZE_{it} + \beta_2 BIND_{it} + \beta_3 ACSIZE_{it} + \beta_4 ACMEET_{it} + \beta_5 ACEXP_{it} + \beta_6 LNSIZE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

ARL	= <i>Audit Report Lag</i>
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$	= Koefisien masing-masing variabel independen
BFSIZE	= Jumlah Dewan Komisaris
BIND	= Komisaris Independen
ACSIZE	= Jumlah Komite Audit
ACEXP	= Kompetensi Komite Audit
ACMEET	= Jumlah Pertemuan Komite Audit
LnSIZE	= Ukuran Perusahaan
ε	= Estimasi Error
i	= <i>Cross Section Identifiers</i>
t	= <i>Time Series Identifiers</i>

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kompetensi komite audit, dan pertemuan komite audit. (Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No.Kep-315/BEJ/06/2000)

1. Jumlah Dewan Komisaris

Cara mengukur variabel ini dengan menghitung jumlah anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan Naimi *et al* (2010). Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan BSIZE.

2. Jumlah Dewan Komisaris Independen

Cara mengukur variabel ini adalah dengan melihat jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan Naimi *et al* (2010). Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan variabel BIND.

3. Jumlah Komite Audit

Variabel ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang ada dalam satu perusahaan (Naimi *et al*, 2010). Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel jumlah Komite Audit ini dilambangkan dalam ACSIZE.

4. Kompetensi Komite Audit

Variabel ini diukur dari jumlah komite audit kompeten dilihat dari komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau berhubungan manajemen keuangan terkait (Naimi *et al*, 2010). Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan ACEXP.

5. Pertemuan Komite Audit

Variabel ini diukur sesuai dengan jumlah pertemuan komite audit yang diadakan selama tahun keuangan (Shukeri & Nelson, 2010). Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan ACMEET.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

1. Ukuran Perusahaan

Ashton *et al* (1989), dalam Naimi *et al* (2010) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat memilih untuk menerapkan kontrol internal yang kuat, yang memungkinkan auditor untuk menempatkan ketergantungan lebih pada tes kepatuhan interim dari pada pengujian *substantive* saldo akhir tahun, sehingga memfasilitasi penyelesaian audit yang tepat waktu. Variabel ini diukur dengan log natural total asset perusahaan pada saat tutup tahun. Variabel ini dilambangkan LnSIZE.

Tabel 1.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Keterangan
	Dependen	
1	ARL	Interval waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan sampai tanggal yang tertera di laporan audit
	Independen	
2	BSIZE	Jumlah anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan
3	BIND	Jumlah anggota dewan independen yang ada dalam suatu perusahaan
4	ACSIZE	Jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan
5	ACEXP	Jumlah komite audit kompeten dilihat dari komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau berhubungan manajemen keuangan terkait
6	ACMEET	Jumlah pertemuan komite audit yang diadakan selama tahun keuangan
	Kontrol	
7	SIZE	Variabel ini diukur dengan natural log total asset perusahaan pada saat tutup tahun

Sumber: Olahan Penulis

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit report lag*

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -5.893361 dan probabilitas sebesar 0.0874 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.1. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah dewan komisaris maka akan semakin menambah *audit report lag*, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan semakin memperpendek *audit report lag*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaannya semakin banyak yang dimiliki oleh perusahaan akan terbentuk koordinasi yang baik dan akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan dan akan membuat pelaporan keuangan lebih cepat untuk dilaporkan sehingga mengurangi *audit report lag* tersebut.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Wu *et al* (2008) dan Naimi *et al* (2010) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daoud (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag* serta Mouna & Anis (2013) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*, berbeda dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap *audit report lag*

Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil negatif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -6.851085 dan probabilitas sebesar 0.0798 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.1. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah dewan komisaris independen maka akan semakin memperlama *audit report lag*, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka akan semakin memperpendek *audit report lag*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2012, Dewan komisaris independen adalah anggota yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris Independen harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Komisaris independen yang merupakan karakteristik *corporate governance* bermanfaat dalam meningkatkan relevansi laporan keuangan dengan cara memperbaiki ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan ke bursa saham. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya keberadaan Komisaris Independen ini, karena tidak terafiliasi dengan pendiri atau pemegang saham mayoritas, bisa mewakili kepentingan pemegang saham publik sehingga ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan kebenaran yang *valid*.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Afify (2009) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shukeri (2010) dan Apadore & Noor (2013) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag*, serta Wu *et al* (2008) dan Daoud (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, berbeda dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*

Pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.93167 dan probabilitas sebesar 0.6874 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah komite audit maka akan semakin memperpanjang *audit report lag*, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin memperpendek *audit report lag*.

Hasil penelitian ini membuktikan jumlah komite audit berpengaruh dan tidak signifikan terhadap waktu penyampaian laporan audit perusahaan, artinya komite audit belum secara maksimal melaksanakan peran dan tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan, sehingga jumlah anggota komite audit yang besar berpengaruh tidak signifikan terhadap *audit report lag*. Dikatakan bahwa semasa komite audit masih mendapat manfaat dari perusahaan, independensinya sulit diwujudkan. Hal ini yang membuat tidak yakin bahwa komite audit efektif dalam menjalankan fungsinya (Vincentus dalam Shinta 2011).

Ukuran komite audit tergantung dari besarnya perusahaan dan kompleksitas pengendalian perusahaan. Semakin besar dan kompleks suatu perusahaan seharusnya perusahaan tersebut memiliki semakin besar jumlah komite audit. Di Indonesia, jumlah komite audit yang rata-rata hanya 3 (tiga) orang anggota membuat kurangnya terjadi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan serta masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan akibatnya karakteristik komite audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *audit report lag*.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Shukeri & Nelson (2010), Naimi *et al* (2010), dan Apadore (2013) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa jumlah komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian sebelumnya.

Pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*

Pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -5.452018 dan probabilitas sebesar 0.0438 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah kompetensi komite audit maka akan semakin memperpanjang *audit report lag*, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin banyak komite audit yang memiliki kompetensi maka akan semakin memperpendek *audit report lag*.

Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Hasil ini membuktikan bahwa komite audit dengan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih sesuai akan secara nyata mampu untuk mengontrol kondisi operasional dan keuangan perusahaan sejak dini sehingga mampu untuk memperpendek *audit report lag* perusahaan.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Naimi *et al* (2010) dan Shukeri & Nelson (2010) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian sebelumnya.

Pengaruh pertemuan komite audit terhadap *audit report lag*

Pengaruh pertemuan komite audit terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.035184 dan probabilitas sebesar 0.808 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah pertemuan komite audit maka akan semakin memperpanjang *audit report lag*, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka akan semakin memperpendek *audit report lag*.

The National Committee on Fraudulent Financial reporting, atau biasa dikenal dengan *Treadway Commission* (1987) dalam Naimi *et al* (2010), menyatakan bahwa Komite Audit yang ingin berperan penting dalam pengawasan perlu untuk mempertahankan tingkat aktivitas pertemuan yang tinggi. Hasil penelitian ini membuktikan apabila aktivitas pertemuan komite audit tinggi akan menjadikan pengawasan yang baik terhadap proses pelaporan keuangan sehingga proses pengawasan ini akan mempercepat *audit report lag*, dikarenakan hal itu maka pertemuan komite audit berpengaruh negatif.

Pertemuan komite audit berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap *audit report lag* karena berdasarkan laporan tahunan (*annual report*) jumlah dari pertemuan komite audit tidak menjamin pembahasan tentang pelaporan keuangan perusahaan sampel sehingga masalah-masalah yang terjadi terkait dengan laporan keuangan perusahaan tidak banyak dibahas dengan eksternal auditor, internal auditor, dewan direksi, dan dewan komisaris membuat pertemuan komite audit tidak signifikan.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Shukeri & Nelson (2010) dan Naimi *et al* (2010) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu karakteristik *corporate governance* yaitu dewan komisaris dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini mengindikasikan bahwa dewan komisaris pada perusahaan memiliki persentase yang besar sehingga dapat membuat pengawasan yang ketat terhadap manajemen dalam melaporkan kinerja mereka melalui ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian ini perusahaan BUMN bisa menjadikan suatu acuan bahwa perlu adanya dewan komisaris yang jumlahnya banyak agar dapat memperpendek *audit report lag*. Sama halnya dengan dewan komisaris, berlaku juga untuk dewan komisaris independen untuk perusahaan BUMN.

Sedangkan, karakteristik *corporate governance* lain yaitu komite audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini disebabkan oleh pembentukan komite audit di perusahaan hanya bersifat pemenuhan kewajiban (*mandatory*) terhadap peraturan yang ada seperti peraturan: Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A dan Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-41/PM/2003, artinya komite audit belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan peran komite audit tidak efektif. Dalam penelitian ini komite audit di proksikan dengan ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan pertemuan komite audit. Dari ketiganya yang memiliki pengaruh signifikan hanya kompetensi komite audit, artinya untuk perusahaan BUMN perlu memperhatikan kompetensi dari setiap anggota komite audit agar dapat membantu perusahaan untuk memperpendek *audit report lag* karena dengan banyaknya komite audit yang memiliki kompetensi akan mampu membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan BEI yang mewajibkan pembentukan komite audit agar tujuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dirasakan. Selama dilakukan para pelaku usaha hanya sebatas memenuhi kewajiban pembentukan komponen GCG tanpa

memperdulikan keefektifan dan manjamin pelaksanaannya serta penerapan prosedur *review* dan kontrol.

Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam hal ini dapat dilihat dari *audit report lag* tersebut dapat mencerminkan keefektifan regulasi, khususnya regulasi tentang penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, kepercayaan pihak internal (manajemen) dan eksternal (investor dan masyarakat) yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan akan meningkat dan mengatasi kemungkinan terjadinya *fraud* (kecurangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Afify, H. A. E., 2009. *Determinants of audit report lag Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt*. Journal of Applied Accounting Research, 10(1), pp. 56-86.
- Apadore, K., & Noor, M. M., 2013. *Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia*. International Journal of Business and Management Volume 8, Nomor 15.
- Arens, A. A., Elder, R. J. & Beasley, M. S., 2014. *Auditing and assurance services – An Intergrated Approach (15thed.)*. USA: Pearson.
- Bursa Efek Jakarta (BEJ). 2000. No.Kep-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa.
- Daoud, K. A. A., Ismail, K. N. I. K. & Lode, N. A., 2014. *The Timeliness of Financial Reporting among Jordanian Companies: Do Company and Board Characteristics, and Audit Opinion Matter?*. Asian Social Science Volume 10, Nomor 13.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS regresi*. Edisi ke-7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. 2010. *Accounting Theory (7th ed.)*. Australia: John Wiley & Sons.
- Gujarati, D. N. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika (3rd ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- Ika, S. R., & Ghazali, N. A. M., 2011. *Audit committee effectiveness and timeliness of reporting: Indonesian evidence*. Managerial Auditing Journal Volume 27 Nomor 4, pp. 403-424.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, M. J., & Trisnawati, E., 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Volume 12, Nomor 13 : 175-186.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J. & Warfield, T. D., 2011. *Intermediate Accounting Vol. 1. IFRS Edition penyunt*. USA: Wiley.

- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. Pedoman Umum GCG Indonesia.
- Mouna, A. & Anis, J., 2013. *Financial reporting delay and corporate governance: evidence from Tunisia*. International Journal of Information, Business and Management, Volume 5 Nomor 4.
- Nachrowi, N. D. & Usman, H., 2006. *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Naimi et al., 2010. *Corporate governance and audit report lag in Malaysia*. Paper SSRN.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2011. Nomor: Kep/346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, 2011. Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan OJK, 2014. No. 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Picket, K. H. S., 2007. *The essential handbook of internal auditing*. USA: Willey.
- Rachmawati, S., 2008. *Pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap audit delay dan timeliness*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 10, Nomor 1 : 1-10.
- Sekaran, U. & Bougie, R., 2013. *Research Methods for business: a skill-building approach* (6th ed.). USA: Willey.
- Shukeri, S. N., & Nelson, S. P., 2010. *Timeliness of Annual Audit Report: some empirical evidence from Malaysia*. Paper SSRN.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U., 2012. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Swami, Ni Putu D., & Latrini, Made Y., 2012. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- The Organization For Economic Cooperation and Development, 2015. *G20/OECD Principles of Corporate Governance*.
- Tuanakotta, T. M., 2013. *Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Uchenna, E., & Peace, O., 2009. *Timeliness of financial reporting in Nigeria*. Paper SSRN.

Winarno, W. W. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Wu, C. H, Wu, C. S. & Liu, V. W., 2008. *The Release Timing of Annual Reports and Board Characteristics*. Paper SSRN.



LAMPIRAN

Hasil Regresi Persamaan

Variable Independen	Coef	t-Stat	Prob.
C	69.51989	1.315764	0.1943
BFSIZE	-5.893361	-1.743538	0.0874*
BIND	-6.851085	-1.788397	0.0798*
ACSIZE	-0.93167	-0.404786	0.6874
ACMEET	-0.035184	-0.244308	0.808
ACEXP	-5.452018	-2.067923	0.0438**
LNSIZE	1.551478	0.719136	0.4754
R-squared	0.336521	Adjusted R-squared	0.256903
F-statistic	4.22672	DW-Stat	1.999139
Prob(F-statistic)	0.001624		

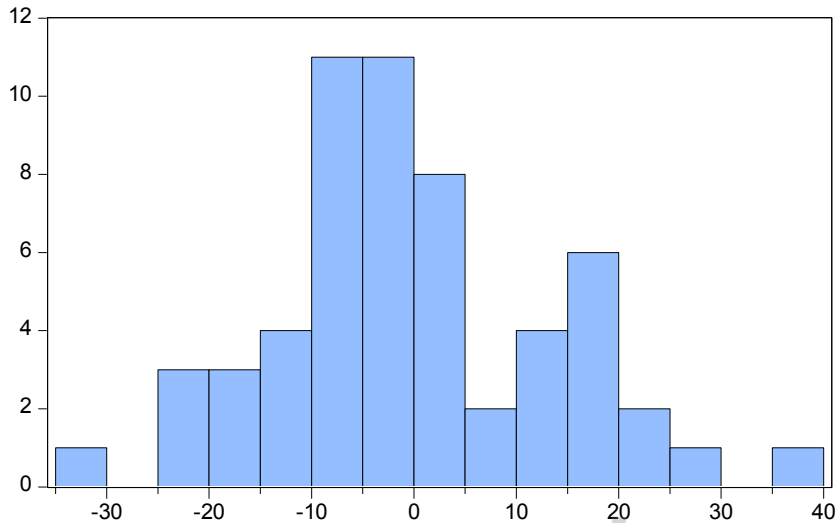
Keterangan:
 Independent Variable : ARL
 ***signifikan 1%
 **signifikan 5%
 *signifikan 10%

Statistik Deskriptif

	ARL	BIND	BFSIZE	ACSIZE	ACMEET	ACEXP	LNSIZE
Mean	52.84211	2.403509	5.982456	4.280702	28.80702	1.491228	31.05271
Median	54.00000	2.000000	6.000000	4.000000	23.00000	1.000000	30.83999
Maximum	101.0000	4.000000	8.000000	8.000000	65.00000	3.000000	34.38217
Minimum	16.00000	1.000000	3.000000	2.000000	6.000000	0.000000	27.80381
Std. Dev.	16.60119	0.820706	0.990873	1.250063	15.80962	0.804514	1.719740
Skewness	0.118696	0.899335	-0.18714	0.950382	0.584195	0.132472	0.291948
Kurtosis	3.665506	2.888615	4.189379	3.889721	2.195752	2.545979	2.497803
Jarque-Bera	1.185725	7.713105	3.692446	10.46071	4.778383	0.656285	1.408700
Probability	0.552743	0.021141	0.157832	0.005352	0.091704	0.720260	0.494430
Sum	3012.000	137.0000	341.0000	244.0000	1642.000	85.00000	1770.004
Sum Sq. Dev.	15433.58	37.71930	54.98246	87.50877	13996.88	36.24561	165.6204
Observations	57	57	57	57	57	57	57

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals Sample 2012 2014 Observations 57	
Mean	-9.16e-15
Median	-0.955240
Maximum	35.61794
Minimum	-30.16258
Std. Dev.	13.52237
Skewness	0.349003
Kurtosis	2.899779
Jarque-Bera	1.180982
Probability	0.554055

Uji Multikolinieritas

	BSIZE	BIND	ACSIZE	ACMEET	ACEXP	LNSIZE
BSIZE	1.000000	0.711538	0.537460	0.246002	-0.123400	0.764360
BIND	0.711538	1.000000	0.479421	0.017119	-0.170337	0.723959
ACSIZE	0.537460	0.479421	1.000000	-0.163466	0.197809	0.663039
ACMEET	0.246002	0.017119	-0.163466	1.000000	-0.298478	0.161351
ACEXP	-0.123400	-0.170337	0.197809	-0.298478	1.000000	-0.063915
LNSIZE	0.764360	0.723959	0.663039	0.161351	-0.063915	1.000000

Uji Autokolerasi

Durbin-Watson stat	1.999139
--------------------	----------

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Park			
Variable	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	3.663254	0.302499	0.7635
BSIZE	0.774572	0.999812	0.3222
BIND	-0.974391	-1.109753	0.2724
ACSIZE	-0.163864	-0.310624	0.7574
ACMEET	-0.015929	-0.482565	0.6315
ACEXP	-0.250337	-0.414276	0.6804
LNSIZE	-0.033814	-0.068383	0.9458